

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kawasan (wilayah) akan selalu bertumbuh dan berkembang dinamis seiring perjalanan waktu, baik dimensi kenampakan fisik maupun non fisik yang melatarbelakanginya. Kenampakan fisik suatu kawasan dapat dilihat dari 3 (tiga) elemen morfologi kota yaitu : karakteristik penggunaan lahan, bangunan dan sirkulasi. Sedangkan kenampakan non fisik meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi dan sebagainya. Tempat-tempat konsentrasi yang umumnya berupa daerah perkotaan tersebar di suatu wilayah dengan penduduk dan besar kota yang tidak sama. Setiap kota berpengaruh pada daerah sekitarnya. Kota merupakan suatu kawasan permukiman yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, dan fasilitas-fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut. Semakin besar suatu kota semakin beragam fasilitas sosial, ekonomi, yang di sediakan oleh pemerintah.

Pemahaman tentang morfologi kota tidak lepas dari wujud fisik kota yang bentuk utamanya oleh kondisi fisik lingkungan maupun interaksi sosial-ekonomi masyarakat yang dinamis. Morfologi kota di dasarkan pada areal yang secara fisik menunjukkan kenampakan perkotaan. Lingkup kajian morfologi menurut Smiles (Yunus, 2005) meliputi (1) penggunaan lahan (*land use*), (2) pola-pola jalan (*street*), (3) dan tipe-tipe bangunan. Pembangunan baik dalam aspek fisik dan non fisik adalah sesuatu yang mutlak diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (kawasan) baik dalam skala lokal, regional dan nasional.

Banyak permasalahan di Indonesia dalam perancangan kota, yang secara khusus berkaitan dengan bentukan fisik dan non fisik seperti hilangnya ruang-ruang terbuka hijau digantikan dengan bangunan padat, karakteristik penggunaan lahan, aspek ekonomi, jumlah penduduk, sosial, budaya dan ketersediaan fasilitas pelayanan. Dalam suatu kota, masalah bentukan fisik juga akan mempengaruhi aktivitas masyarakat dan penyediaan fasilitas pelayanan yang mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Fasilitas ekonomi meliputi fasilitas pasar, toko, kios atau warung, reperasi sepeda motor, hotel/penginapan, wartel/warnet. Fasilitas sosial meliputi fasilitas pendidikan/sekolah negeri dan swasta, kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, pustu, apotek), perumahan, air bersih, jaringan listrik, rumah ibadah, sarana transportasi, kantor pos. Oleh karena itu, adanya masalah fisik kota tersebut telah mendorong pada kebutuhan mengkaji kota secara khusus dari aspek morfologinya.

Kota Balige adalah bagian dari Kecamatan Balige sekaligus ibukota dari Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Balige memiliki luas wilayah 91.05 km² yaitu 4.50% dari total luas Kabupaten Toba Samosir. Kecamatan Balige terdiri dari 6 kelurahan dan 29 desa yaitu 1) kelurahan Sangkar Hi Huta, 2) kelurahan Pardede Onan, 3) kelurahan Napitipulu Bagasan, 4) kelurahan Balige III, 5) kelurahan Balige I, 6) Kelurahan Lumban Dolok Haumabange, kemudian desa terdiri 1) Desa Aek Bolon Julu, 2) Desa Aek Bolon Jae, 3) Desa Siboruan, 4) Desa Hutagaol Peatalun, 5) Desa Bonan Dolok II, 6) Desa Hutanamora, 7) Desa Hutadame, 8) Desa Bonan Dolok I, 9) Desa Bonan Dolok III, 10) Desa Sibuntuon, 11) Desa Lumban Gorat, 12) Desa Sianipar Sihail-hail, 13) Desa Silalahi Pagar Batu, 14) Desa Hinalang Bagasan, 15) Desa Balige II, 16) Desa Paindoan, 17) Desa Parsuratan, 18) Desa Huta

Bulu Mejan, 19) Desa Saribu Raja Janji Maria, 20) Desa Baruara, 21) Desa Matio, 22) Desa Lumban Pea, 23) Desa Lumban Gaol, 24) Desa Sibola Hotang SAS, 25) Desa Lumban Bulbul, 26) Desa Longat, 27) Desa Lumban Silintong, 28) Desa Lumban Pea Timur, 29) Desa Tambunan Sunge. Sementara yang termasuk dalam Kota Balige adalah 6 kelurahan yang terdapat dalam Kecamatan Balige yaitu 1) kelurahan Sangkar Hi Huta, 2) kelurahan Pardede Onan, 3) kelurahan Napitipulu Bagasan, 4) kelurahan Balige III, 5) kelurahan Balige I, dan 6) Kelurahan Lumban Dolok Haumabange.

Lokasi kota ini di tentukan oleh topografi yang dimiliki oleh kota itu sejak berdiri, dimana topografi yang datar akan memungkinkan banyaknya jaringan jalan di kota sehingga memudahkan untuk berinteraksi dengan daerah-daerah lain di sekitar kota dalam kegiatan ekonomi dan mobilitas penduduk. Letak strategis didukung dengan sarana transportasi dan pembangunan kebutuhan transportasi bermula dari satu penyebaran kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Selama menjadi bagian dari Tapanuli, Daerah Balige merupakan salah satu daerah yang sudah cukup berkembang baik dari segi ekonomi dan terutama dalam bidang pendidikan yang dapat dilihat dari keberadaan sekolah yang ada di Kecamatan ini yaitu Yayasan Soposurung yang merupakan salah satu sekolah unggulan yang didirikan oleh TB Silalahi yang kemudian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Toba Samosir . Kabupaten Toba Samosir dibentuk dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1998 dan diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Terbitnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah memberikan kewenangan

kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menjadi acuan bagi Toba Samosir untuk memekarkan diri menjadi kabupaten baru. Dengan dibentuknya kabupaten baru, maka harus mempunyai sebuah Ibukota Kabupaten sebagai pusat pemerintahan dan kepentingan lainnya.

Awal pemilihan Balige sebagai Ibu Kota Kabupaten Toba Samosir telah di latar belakang dari masa Hindia Belanda dan masa Jepang masih berada di Indonesia. Pada masa Hindia Belanda daerah-daerah yang berada di Afdeling Batak landen di bagi atas lima wilayah yang di mana salah satunya wilayah Onder Afdeling Toba yang di mana wilayahnya dulu adalah wilayah sebagaian Kabupaten Toba Samosir. Onder Afdeling Toba beribu Kota di Balige sehingga pusat dari Pemerintahan Afdeling Toba berada di Balige. Pemilihan Balige sebagai Ibu Kota Kabupaten Toba Samosir tidak mengalami kendala atau protes dari masyarakat ataupun Pemerintah, di karenakan sejak jaman Belanda samapai kemerdekaan, wilayah Balige sudah menjadi wilayah yang penting dan dijadikan tempat pusat pemerintahan dan dari segi fasilitas Balige sudah memiliki fasilitas yang memadai sebagai awal seperti sudah adanya Bank Rakyat Indonesia yang sudah beroperasi sebelum adanya pemekaran.

Sebagai ibukota kabupaten, Kota Balige merupakan kota tersibuk di sekitaran kawasan Danau Toba. Hal itu dikarenakan kota Balige merupakan jalur lintas Sumatera dankondisi tersebut lambat laun membuat Kota Balige berkembang dan merespon kebutuhan para pendatang maupun yang akan

menyeberang dengan memberikan jasa maupun usaha dagang dan membangun kios-kios maupun toko yang pada akhirnya membentuk suatu area bisnis.

Perkembangan Kota Balige secara tidak langsung menimbulkan ketidakteraturan dalam penataan tata ruang kota, dan terjadi pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dengan keadaan tersebut, membuat pertumbuhan penduduk di Kota Balige juga semakin tinggi. Perkembangan kota yang pesat mendorong pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang cukup besar yaitu dalam bidang pelayanan sosial dan ekonomi. Fasilitas ekonomi meliputi fasilitas pasar, toko, kios atau warung, reperasi sepeda motor, hotel/penginapan, wartel/warnet. Fasilitas sosial meliputi fasilitas pendidikan/ sekolah negeri dan swasta, kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, pustu, apotek), perumahan, air bersih, jaringan listrik, rumah ibadah, sarana transportasi, kantor pos.

Sebagai Ibukota Kabupaten Toba Samosir, Kota Balige telah mengalami perkembangan yang dapat ditinjau dari elemen pembentuknya yaitu aspek fisik maupun non-fisiknya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi morfologinya. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai Morfologi Kota Balige Kabupaten Toba Samosir.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : Kondisi kota Balige yang semakin berkembang akan mempengaruhi morfologi kota, yang dapat dilihat dari aspek fisik baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh aspek non-fisik sebagai latar belakang perkembangan kota. Aspek fisik kota dapat di lihat dari 3 elemen pembentuk kota itu sendiri, yaitu : (1) penggunaan lahan, (2) bangunan, (3) sirkulasi jalan. Sementara aspek non-fisik yaitu : (1) Fasilitas ekonomi meliputi

pelayanan pasar, toko, kios atau warung, reperasi sepeda motor/mobil, hotel/penginapan. (2) Fasilitas sosial meliputi fasilitas pendidikan/ sekolah negeri dan swasta, kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, pustu, apotek), perumahan, air bersih, jaringan listrik, rumah ibadah, sarana transportasi, kantor pos.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yaitu : Morfologi kota di lihat dari elemen pembentuk kotanya yaitu aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik yaitu penggunaan lahan, tipe bangunan, dan sirkulasi jalan. Sementara aspek non-fisik yaitu : Fasilitas ekonomi meliputi fasilitas pasar, toko, reperasi sepeda motor/mobil, hotel/penginapan. Fasilitas sosial meliputi fasilitas pendidikan/ sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi/Universitas), kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, poskesdes) dan rumah ibadah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana morfologi Kota Balige di lihat dari elemen pembentuk kota yaitu:

1. Aspek fisik yaitu penggunaan lahan, tipe bangunan, dan sirkulasi jalan.
2. Aspek non-fisik yaitu : 1) Fasilitas ekonomi meliputi fasilitas pasar, toko, hotel/penginapan. 2) Fasilitas sosial meliputi fasilitas pendidikan/ sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA Perguruan Tinggi/Universitas), kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, poskesdes) dan rumah ibadah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah ini adalah untuk mengidentifikasi morfologi kota Balige dilihat dari :

1. Aspek fisik yaitu penggunaan lahan, tipe bangunan, dan sirkulasi jalan.
2. Aspek non-fisik yaitu : 1) Fasilitas ekonomi meliputi fasilitas pasar, toko, hotel/penginapan. 2) Fasilitas sosial meliputi fasilitas pendidikan/ sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi/Universitas), kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, poskesdes) dan rumah ibadah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat:

1. Memberikan gambaran tentang morfologi Kota Balige Kabupaten Toba Samosir.
2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam melakukan proses pembangunan sesuai dengan perkembangan dan morfologi Kota Balige.
3. Untuk menambah wawasan penulis dalam membuat tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.
4. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam obyek yang sama, pada tempat yang sama dengan waktu yang berbeda.